

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
PADA SDN MEJASEM TIMUR 02 KEC. KRAMAT KAB. TEGAL



TUGAS AKHIR

OLEH :

**DWINGGA MILLENIA RESDIANTI**

**NIM 18030152**

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN MEJASEM TIMUR 02 KEC. KRAMAT KAB. TEGAL.

Oleh mahasiswa :

Nama : Dwingga Millenia Resdianti

NIM : 18030152

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 21 Juli 2021

Pembimbing I,



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT

NIPY. 04.015.210

Pembimbing II,



Mohammad Alfian.SE,M.Si

NIPY. 04. 015. 213

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) PADA SDN MEJASEM TIMUR 02 KEC. KRAMAT KAB. TEGAL.

Oleh :

Nama : Dwingga Millenia Redianti

NIM : 18030152

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 26 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT

Pembimbing I

2. Hertika, S.Pd, M.Si, CAAT

Penguji I

3. Anita Karunia, SE, M.Si

Penguji I



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 009.011.062

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN MEJASEM TIMUR 02 KEC. KRAMAT KAB TEGAL”, beserta isinya adalah benar – benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Dwingga Millenia Resdianti

NIM 18030152

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan dibawah ini, saya:

**NAMA : DWINGGA MILLENIA RESDIANTI**

**KELAS : 18030152**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif in Prodi Akutansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya, dan menampilkan/mempublikasikanya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Dwingga Millenia Resdianti

NIM 18030152

## **HALAMAN MOTTO**

**“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)”**

**“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn Underhill)”**

**“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak (Q.S. Mazmur 37:5)”**

**“Jangan terlalu khawatir jika Tuhan menjauhkan kamu dari orang – orang dalam hidup kamu, karna Ia mendengar apa yang tidak bisa kamu dengar, dan Ia juga melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Jadi, jika Tuhan menjauhkannya percayalah kepada rancangannya”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa membrikan rahmat dan ridho hamba-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhhamad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai tepat pada waktunya. Mereka adalah:

- Orang tua saya Ibu Wiwit Sulistioningsih S.Pd yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan serta semangat agar tidak mudah menyerah dan putus asa dan yang selalu direpotkan.
- Untuk Almarhum Ayah saya Joni Resdiantio terimakasih telah menjadi ayah yang baik, kuat dan terhebat. Aku merindukanmu setiap hari.
- Untuk Kakak saya Bimo Resdianto Prakoso yang selalu memberikan saya semangat dan selalu mendoakan agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
- Untuk Kakek saya Suroso dan sepupu saya Lia terimakasih doa dan selalu memberikan dukungan serta semangat untuk saya.
- Keluarga Besar Suparso semoga sehat selalu, sudah lama tidak berjumpa semoga pandemi cepat berakhir. Agar bisa berkumpul bersama seperti dulu. Amin.
- Teman-teman Kelas E angkatan 2018 Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
- Teruntuk anggota "MBUH BAE" terdiri dari: Yunita, Wijianti, Artha, Risti, Lisa, Tiara. Terimakasih kalian selalu ada dan bersyukur mempunyai teman – teman seperti kalian semua.
- Untuk teman – teman ngopi ku. Terimakasih selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, dan selalu memberi semangat.
- Last but not least, I wanna thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Mohammad Alfian.SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Taisah S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN Mejasem Timur 02
6. Seluruh Bapak dan Ibu Guru di SDN Mejasem Timur 02.

7. Teman-teman prodi D3 Akuntansi, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati akuntansi pada umumnya.

Tegal, 21 Juli 2021

Dwingga Millenia Resdianti

NIM. 18030152

## ABSTRAK

Dwingga Millenia Resdianti. 2021. *Analisis Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SDN Mejasem Timur 02*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si; CTT. Pembimbing II: Mohammad Alfian., SE., M.Si.

SDN Mejasem Timur 02 adalah sekolah dasar negeri di wilayah Kabupaten Tegal yang menerima program dari Pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN Mejasem Timur 02. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknis pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu adanya perencanaan menyusun RKAS, faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana BOS, adanya keterlibatan semua stakeholder yang berkepentingan seperti guru, komite sekolah, tim manajemen sekolah dan dinas pendidikan.

**Kata kunci :** *Transparansi dan Akuntabilitas, Faktor pendukung dan Penghambat, Pengelolaan Dana BOS.*

## ABSTRACT

**Residianti, Dwingga Millenia.** 2021. *Analysis of the Principles of Transparency and Accountability in the Management of School Operational Assistance Funds at SDN Mejasem Timur 02.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N, S.Pd., M.Si; Co-Advisor: Mohammad Alfian, SE., M.Si.

*SDN Mejasem Timur 02 is a public elementary school in the Tegal Regency area that receives a program from the Government in the form of School Operational Assistance funds. The purpose of this study was to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of school operational assistance funds (BOS) at SDN Mejasem Timur 02. This research was a qualitative descriptive study. Technical data collection researchers using the method of observation, interviews, literature study, and documentation. Data analysis techniques used by researchers were data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicated that the application of the principles of transparency and accountability at SDN Mejasem Timur 02 is in accordance with the principles of transparency and accountability, namely the existence of planning to prepare the RKAS, the supporting and inhibiting factors for the implementation of the principle of transparency and accountability of BOS funds, the involvement of all interested stakeholders such as teachers, school committee, school management team and education office.*

**Keywords:** *Transparency and Accountability, Supporting and Inhibiting Factors, BOS Fund Management.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRAC .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Kerangka Pikir.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penerpan Prinsip Transparansi .....	12
2.1.1 Pengertian Prinsip Transparansi.....	12

2.1.2 Tujuan Transparansi .....	13
2.1.3 Manfaat Transparansi .....	14
2.1.4 Indikator Tercapainya Transparansi .....	15
2.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas .....	18
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas .....	18
2.2.2 Tujuan Akuntabilitas .....	20
2.2.3 Manfaat Akuntabilitas .....	21
2.2.4 Indikator Tercapainya Akuntabilitas .....	22
2.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	25
2.3.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	26
2.3.2 Prinsip - Prinsip pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	27
2.3.3 Tujuan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	29
2.3.4 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	31
2.4 Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS .....	39
2.5 Faktor Penghambat Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS .....	40
2.6 Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	45
3.2 Waktu Penelitian .....	45
3.3 Jenis Data .....	45
3.4 Sumber Data .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6 Teknik Analisis Data .....	48

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN .....	50
4.1 Gambaran Umum SDN Mejasem Timur 02 .....	50
4.2 Hasil Penelitian .....	51
4.2.1 Anggaran Belanja Bantuan Operasional Sekolah .....	51
4.2.2 Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	52
4.2.3 Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	58
4.2.4 Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	63
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
4.3.1 Analisis Transparansi Menurut JUKNIS .....	67
4.3.2 Analisis Akuntabilitas Menurut JUKNIS .....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 4.1 Analisis Transparans Menurut JUKNIS .....	67
Tabel 4.2 Analisis Akuntabilitas Menurut JUKNIS .....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	8
-----------------------------------	---

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, dengan pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan global dalam kehidupan. Era globalisasi, pendidikan menjadi suatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi rendah. Rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin adalah biaya pendidikan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003<sup>[1]</sup> bentuk pendanaan pendidikan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat dasar dan menengah pertama akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Program BOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar mereka memperoleh layanan.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik terdapat pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Empat prinsip yang telah ditetapkan akan tetapi dalam penelitian ini dua prinsip yang diteliti. Peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pengelolaan dana pendidikan maka seluruh sekolah harus melakukan prinsip yang telah ditetapkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 ini dilampiri petunjuk teknis kelola keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan.

Akuntabilitas menurut Minarti (2011:225)<sup>[2]</sup> adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan tanggung jawabnya. Pentingnya akuntabilitas yaitu mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Oleh karena itu penerapan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana BOS. Menurut Minarti (2011:224)<sup>[2]</sup> Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SDN Mejasem Timur 02 yang menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 sudah berlangsung dengan baik, dan dikelola secara fleksibel dan transparan tetapi masih ada kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah dan mempelajari dokumen pencatatan dan pembukuan dana BOS, pencairan dana BOS dari pemerintah sering mengalami ketelambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu pada bulan pertama periode triwulan berjalan. Berdasarkan informasi tersebut pencairan dana BOS tidak setiap bulan sehingga sekolah mengalami kebingungan dalam mengelola biaya operasional sekolah. Jadi untuk menutupi kebutuhan selama dana BOS belum cair biasanya memakai uang kas sekolah yang digunakan seperti membayar guru honorer, Pembina ekstrakuler, dan membayar langganan daya dan jasa ( listrik, air, telpon, dan biaya operasional sekolah lainnya).

Menurut Fauzia (2016)<sup>[3]</sup> penerapan akuntabilitas terhadap penggunaan BOS Pada Madrasah Aliyah masih belum berjalan baik, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2016. Menurut Ekowati (2016)<sup>[4]</sup> penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMP N 03 Kota Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS kesesuaian aturan dan petunjuk

teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya.. Menurut Julantika dkk (2017)<sup>[5]</sup> pengelolaan dana BOS pada SDN Pringgowirawan 02 Jember dinilai dari jumlah BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan dan kesesuaian penggunaan disini dilihat dari angka rasio yang ditunjukkan. Menurut Solikhatun (2016)<sup>[6]</sup> pengelolaan dana BOS di SMK N 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai 70%, prinsip transparan dilaksanakan cukup baik 78%. Menurut Maries (2017)<sup>[7]</sup> penerapan transparansi pada Yayasan Pendidikan *full day* Mardatillah Singaraja, sudah cukup baik ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yayasan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas dan transparansi dana BOS digunakan untuk operasinal sekolah. SDN Mejasem Timur 02 sudah dapat terdani dengan adanya dana BOS meskipun tidak semua kegiatan sekolah dapat terpenuhi dengan dana BOS. Partisipasi warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah dan wali murid merupakan parameter yang tidak dapat dipisahkan dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Berdasarkan penelitian terdahulu dan pengamatan awal peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Mejasem Timur 02 Kec Kramat Kab. Tegal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 serta untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program DIII Akuntansi di Politeknik Harapan Bersama Tegal.

b. Sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi SDN Mejasem Timur 02 penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dalam menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan.

b. Bagi Politeknik Harapan Bersama, sebagai bahan masukan dan menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam materi pembelajaran di Politeknik Harapan Bersama Tegal.

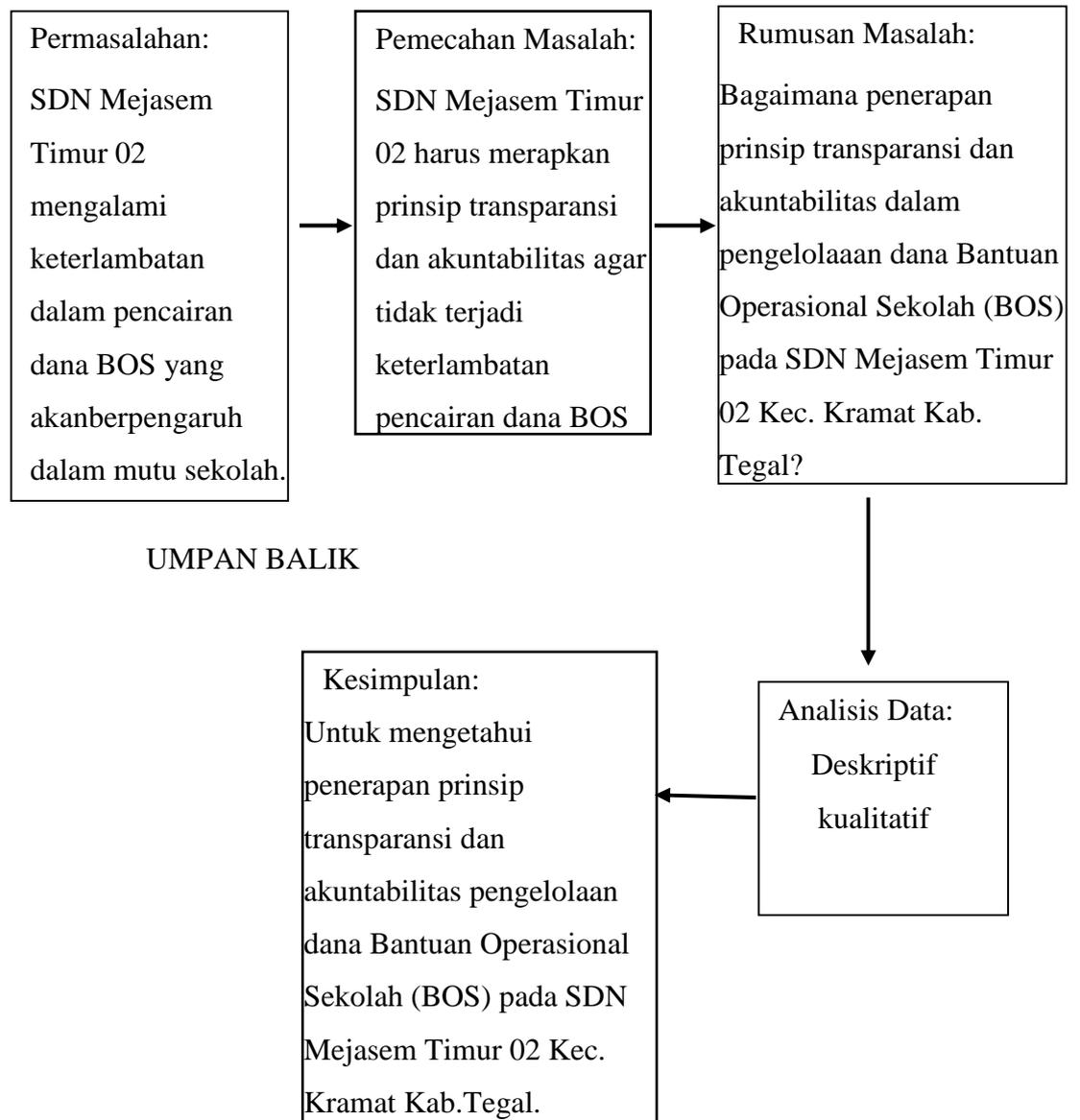
### **1.5 Batasan Masalah**

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini adalah mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab Tegal.

### **1.6 Kerangka Pikir**

SDN Mejasem Timur 02 salah satu sekolah dasar yang menerima bantuan dana BOS. Sekolah yang maju dapat ditentukan oleh beberapa aspek mulai dari mutu pendidikan, sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang handal dan profesional, dan tentunya manajemen pengelolaan keuangan yang baik.

Permasalahan yang masih dialami oleh tim manajemen BOS di SDN Mejasem Timur 02 adalah kurangnya partisipasi masyarakat karena tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran dana BOS sehingga mereka kurang melakukan pengawasan. Bendahara BOS mengalami kesulitan karena seringnya ada perubahan aplikasi program dana dari tim BOS pusat, dan keterlambatan pencairan dana BOS. Keterbukaan informasi public menjadi salah satu indikator kunci dalam melakukan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang terkait dengan dana BOS. Berikut ini terdapat kerangka berpikir yang akan dilakukan oleh peneliti :



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

### 2. Bagian Isi terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian terkait variabel penelitian. Teori-teori tersebut

diambil dari berbagai referensi yang ada, juga dari literatur dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu pada tinjauan pustaka juga berisi kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan dalam rumusan masalah.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

### 3. Bagian Akhir

## LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, misalnya kartu konsultasi, data-data yang diperlukan serta dapat berupa gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, atau gambar yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penerapan Prinsip Transparansi**

##### **2.1.1 Pengertian Prinsip Transparansi**

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Victoria:2014).<sup>[8]</sup>

Menurut Bastian (2007:4)<sup>[9]</sup> transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan bersama. Selanjutnya Adrianto (2007:21)<sup>[10]</sup> transparansi anggaran adalah keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah memberikan makna bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik, dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah.

### **2.1.2 Tujuan Transparansi**

Tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya

penyimpangan- penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi (Novie:20017).<sup>[11]</sup>

shafratunnisa (2015)<sup>[12]</sup> mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomedasinya usulan/suara rakyat.
5. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat memanipulasi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

### **2.1.3 Manfaat Transparansi**

Menurut Nico (2007,21)<sup>[10]</sup> bahwa beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Mencegah korupsi

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
5. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai manfaat transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.

#### **2.1.4 Indikator Tercapainya Transparansi**

Menurut Nico (2007:21-22)<sup>[10]</sup> bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
2. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
3. Adanya basis legal untuk pajak.

4. Adanya basis legal untuk pertanggung jawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
5. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
6. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
7. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
8. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
9. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
10. Adanya dokumentasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi fiskal.
11. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
12. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
13. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
14. Adanya jantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
15. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
16. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
17. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan

anggaran.

18. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Shafratunnisa (2015)<sup>[12]</sup> keberhasilan transparansi ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan publik kepada sekolah.
2. Meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah.
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah, dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai indikator pencapaian transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian transparansi lembaga pendidikan (sekolah) dapat melakukan keterbukaan atas berbagai aspek pelayanan, melibatkan semua stakeholders dalam proses anggaran maupun kegiatan yang dilaksanakan sekolah, memiliki sarana untuk menyumbangkan aspirasi *stakeholders*, dan memiliki aturan dalam melaksanakan kegiatan.

- a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

- b. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
- c. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- e. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
- f. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

## **2.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas**

### **2.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan pertanggungjawaban (Shafratunnisa:2015).<sup>[12]</sup>

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata account yang berarti catatan atau laporan dan ability yang berarti kemampuan. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Organisasi

yang *accountable* adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif (Victoria:2014).<sup>[8]</sup> Lebih lanjut Shafratunnisa (2015)<sup>[12]</sup> mengemukakan bahwa Akuntabilitas adalah “pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.” Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar untuk membangun prinsip akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Sutedjo

(2009)<sup>[13]</sup> bahwa terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
2. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Berdasarkan paparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

### **2.2.2 Tujuan Akuntabilitas**

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik (Victoria:2014).<sup>[8]</sup> teknis bantuan operasional sekolah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Menurut Waluyo (2007:197)<sup>[14]</sup> manajemen suatu organisasi harus “*accountable*” untuk :

1. Menentukan tujuan yang tepat.
2. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
3. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Berdasarkan adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan,

menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

### **2.2.3 Manfaat Akuntabilitas**

Menurut Waluyo(2007:182)<sup>[14]</sup> perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi organisasi
3. Mendoronf partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien,efektif,ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

### **2.2.4 Indikator Tercapainya Akuntabilitas**

Menurut Sutedjo (2009)<sup>[13]</sup> bahwa sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya indikator yang jelas dan penilaian secara obyektif. Pengawasan dan pemberian sanksi yang jelas merupakan aturan main yang harus ditegakkan jika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait akuntabilitas. Untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi, sekolah perlu mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggung jawaban. Ini perlu diupayakan untuk menjaga kepastian tentang pentingnya akuntabilitas.
2. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran

kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.

5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun
6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.
7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
8. Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Berdasarkan uraian yang ada mengenai akuntabilitas, prinsip akuntabilitas dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas yaitu :

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :
  - a. pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan.
  - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai- nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

- maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
- c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
  - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
  - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa maupun media komunikasi personal.
  - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
  - c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
  - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan

monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

## **2.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

### **2.3.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)**

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009<sup>[15]</sup> standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) triwulan sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Fattah(2014)<sup>[16]</sup> memberikan penjelasan mengenai biaya dalam pendidikan, bahwa biaya dalam pendidikan meliputi

biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earningforgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

### **2.3.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan dana BOS**

Menurut Solikhatun 2016<sup>[6]</sup> Manajemen atau pengelolaan keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip swakelola adalah direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri sedangkan prinsip partisipatif adalah melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam
2. memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Prinsip transparan menekankan bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan kritik, saran serta

- melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
4. Prinsip akuntabel adalah pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati.
  5. Prinsip demokratis adalah penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.
  6. Prinsip efektif dan efisien adalah mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
  7. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan adalah sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
  8. Prinsip saling percaya adalah Pemberian dana BOS berlandaskan rasa saling percaya antara pemberi dan penerima, termasuk warga sekolah dan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59<sup>[17]</sup> mengenai

prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan antara lain:

1. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang
2. seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial- ekonomi.
3. Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
4. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi atas kpatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
5. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan meliputi prinsip keadilan, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, demokratis, tertib administratif dan pelaporan, dan saling percaya.

### **2.3.3 Tujuan Pengelolaan Dana BOS**

Berdasarkan buku Petunjuk teknis BOS 2017<sup>[18]</sup> tujuan dana BOS pada SMA/SMALB/SMK untuk :

1. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. meningkatkan angka partisipasi kasar;
3. mengurangi angka putus sekolah,
4. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmativeaction*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah
5. memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya

tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

6. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Bantuan dana BOS bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa miskin dengan cara melibatkan peran pemda melalui BOS Daerah dan atau menerapkan subsidi silang (Fauzan,2014).<sup>[19]</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan dana BOS adalah memberikan nilai tambah keuntungan sekolah dalam mendapatkan sumber keuangan dan untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan. Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

#### **2.3.4 Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah**

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep mahaem keuangan sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Mulyono (2014)<sup>[20]</sup> mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak lepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Dalam buku petunjuk teknis BOS, Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam

hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan evaluasi setiap tahun.
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Prinsip dan tujuan pengelolaan dana BOS merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya alat ukur dan standarisasi yang mengatur tentang pengelolaan dana BOS. Berikut ini alat ukur dan standarisasi atau indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah Permendikbud No 26 Tahun 2017<sup>[21]</sup> sebagai berikut:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran dan untuk penyelenggara kurikulum 2006.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu penggandaan formulir, administrasi

- pendaftaran, penentuan peminatan/psikotest,
3. publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya); biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan/atau konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.
  4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler, seperti pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran, pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran, pembiayaan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan
  5. Pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba), Pengembangan Pendidikan Karakter, sekolah sehat dan aman, dan program pelibatan keluarga di sekolah.
  6. Pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, fotokopi laporan

pelaksanaan hasil ujian, biaya konsumsi, biaya transportasi pengawas ujian dan transportasi ke dinas pendidikan).

7. Pembelian alat/bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flashdisk, tinta printer, buku induk peserta didik, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, pembelian peralatan kebersihan sekolah, peralatan kesehatan dan keselamatan, pembiayaan pengelolaan dana BOS, pembiayaan korespondensi untuk sekolah, pembiayaan untuk website sekolah.
8. petugas pendataan siswa pada Dapodik. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
9. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah seperti penyelenggaraan kegiatan MGMP, MKKS, workshop/lokakarya, dimana pembiayaannya meliputi fotokopi
10. bahan/materi, pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, konsumsi, dan transportasi dan jasa profesi bagi

narasumber.

11. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, langganan koran, majalah/publikasi yang terkait dengan pendidikan, dan iuran kebersihan/sampah. Biaya pemasangan instalasi dan penambahan listrik, biaya langganan internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
12. Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, pembelian meja/kursi peserta didik dan guru, lantai, plafond, lampu, perbaikan sanitasi sekolah( kamar mandi dan WC), perbaikan saluran air hujan, perawatan/perbaikan komputer(printer, laptop, LCD dan AC), perbaikan peralatan praktikum, pemeliharaan dan perbaikan taman sekolah atau fasilitas lainnya.
13. Pembayaran honorarium guru pada jenjang SMA sebagai akibat pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima, guru honor yang memiliki kualifikasi

akademik S-1/D-IV, dan bukan guru yang baru direkrut setelah pengalihan kewenangan, dan guru honor tersebut wajib memperlihatkan tembusan penugasan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

14. Pembelian komputer (*desktop/work station*), printer dan laptop dan juga
15. proyektor/LCD untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran.

Ketentuan Penggunaan dana BOS di Sekolah Buku teknis penggunaan dana BOS 2017:

1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.

3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS yang di terima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
5. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh KWK Kecamatan/ Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

7. Membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
8. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
10. Membangun gedung/ruangan baru.
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
12. Menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau
14. pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

#### **2.4 Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS**

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan
2. Terjalannya bentuk kerja sama yang baik dari pihak pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah.
3. Motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal.
4. Dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga.
5. Ketetapan pencairan dana BOS.
6. Kesesuaian antara pengguna dana BOS dengan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

## **2.5 Faktor Penghambat Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS.**

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

1. Waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan.
2. Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah
3. Sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan.
4. Dana bantuan operasional sekolah belum mampu

membayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

5. Minimnya pengetahuan pengelola administrasi keuangan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian

No	Judul, Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah “AF” Erna Fauzia, 2016	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntabilitas terhadap penggunaan BOS masih belum berjalan baik, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2016.
2.	Transparansi Dan	Kualitatif dengan	Penerapan Transparansi

	<p>Akuntabilitas Dalam pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP N 03 Kota Tangerang Selatan), Santi Ekowati 2016.</p>	<p>deskriptif analisis</p>	<p>dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada Sekolah, Kota/Kabupaten dan Pemerintahan Pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses dana BOS sesuai dengan aturan Pemerintah atau</p>
--	---	----------------------------	---

			sesua petunjuk teknis dalam pengelolaannya
3.	Akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember), Tutus Julantika, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman, 2017	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan disini dilihat dari angka ratio yang ditunjukkan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.
4	Analisis Pengelolaan Dana BOS (studi Kasus pada SMK N 1 Yogyakarta), Ismi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana BOS di SMK N 1

	Solikhatun (2016)		Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai 70%, prinsip transparan dilaksanakan cukup baik 78%
5	Menelaah Trasparansi dan Akuntabilatas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan FULL DAY Mardatillah Singaraja, Novie KiftiahMaries (2017)	Deskriptif Kualitatif	Yayasan Mardatillah memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan para donator, infaq anggota yayasan, iuran siswa Mardatillah, dan bantuan Pemerintah. Penerapan transparansi yayasan Mardatillah sudah cukup baik ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap

			penyelenggara pendidikan yayasan.
--	--	--	--------------------------------------

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat pada SDN Mejasem Timur 02 Jalan Gili Satu No. 390 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

#### **3.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021.

#### **3.3 Jenis Data**

1. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2014)<sup>[22]</sup> data kualitatif adalah data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Data kualitatif penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ada di SDN Mejasem Timur 02, wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru – guru SDN Mejasem Timur 02.

2. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2014)<sup>[22]</sup> data kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### **3.4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer menurut sugiyono (2014:188)<sup>[22]</sup> adalah data yang dapat dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara dan observasi langsung kepada Kepala Sekolah dan Guru – guru di SDN Mejasem Timur 02.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder menurut sugiyono (2014:188)<sup>[22]</sup> adalah data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah mengenai analisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Laporan Keuangan berdasarkan Dokumentasi di SDN Mejasem Timur 02. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329)<sup>[23]</sup> adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015:72)<sup>[23]</sup> wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

c. Studi pustaka

Menurut sugiyono (2015:291)<sup>[23]</sup> studi pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti, studi kepustakaan sangat penting dalam

melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan tugas akhir.

d. Dokumentasi

Menurut widodo (2014:75)<sup>[24]</sup> Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda yang ada di SDN Mejasem Timur 02.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2014)<sup>[22]</sup> menjelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.
2. Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, menghasilkan informasi terkait mengenai pengumpulan data keuangan BOS di SDN Mejasem Timur 02.

3. Penyajian data adalah melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami. Dalam penyajian data ini peneliti menganalisis bagaimana tahapan prosedur pada dana BOS yang ada di SDN Mejasem Timur 02.
4. Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum SDN Mejasem Timur 02**

SDN Mejasem Timur 02 beralamat Jl. Gili Satu No. 390 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. SDN Mejasem Timur 02 didirikan pada tahun 1982 dengan NPSN 23025017 dan NSS 101032816024. SDN Mejasem Timur 02 berdiri diatas tanah milik pemerintah, karena merupakan sekolah negeri. SDN Mejasem Timur 02 mempunyai guru – guru yang kompeten di bidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Jumlah guru dan penjaga saat ini di SDN Mejasem Timur 02 ada 12 orang guru dan 1 penjaga sekolah.

SDN Mejasem Timur 02 sudah menggunakan Kurikulum 13. Saat ini SDN Mejasem Timur mengalami kenaikan murid dalam 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 jumlah siswa 203 dan pada tahun 2020 memiliki siswa 213 terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. SDN Mejasem Timur 02 salah satu SDN yang menerima Bantuan dana BOS dari Pemerintah dan selalu tepat waktu dalam pelaporan.

## **4.2 Hasil penelitian**

### **4.2.1 Anggaran Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Anggaran Dana BOS merupakan anggaran belanja sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dimana anggaran pendidikan itu bersumber dari anggaran Negara yang harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Penyaluran dana BOS dilakukan Berdasarkan surat usulan yang diterima, yaitu atas Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, surat tersebut dimasukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk diproses. Berdasarkan surat tersebut dana BOS dialokasikan dari pusat ke provinsi, dana yang telah masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi akan langsung disalurkan kepada masing – masing rekening sekolah SDN Mejasem Timur 02.

Dana BOS yang diterima oleh SDN Mejasem Timur 02 Tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.191.700.000 Pencairan dana BOS dilakukan tiga kali penerimaan yaitu triwulan 1 diterima pada bulan Februari, triwulan 2 diterima pada bulan Mei, triwulan 3 diterima pada bulan Oktober Berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dana BOS yang diterima akan diperuntukan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian / penggandaan buku teks pembelajaran, Pembiayaan UH, UTS, UAS, UKK, US, UN, Pembiayaan penerimaan siswa baru,

Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honorarium guru, pembelian alat/bahan habis pakai, pembelian alat multimedia.

#### **4.2.2 Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

##### 1) Perencanaan penggunaan Dana BOS

Berdasarkan pembuatan perencanaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 diawali dengan pembuatan RKAS, sekolah membuat RKAS sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya. RKAS disusun sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS, dengan adanya RKAS maka pihak sekolah dapat merencanakan kerja tahunan sekolah untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dari dana BOS selama satu tahun. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera. Menurut Asmani<sup>[25]</sup> “Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun. Berdasarkan teori diatas

untuk mengetahui perencanaan BOS di SDN Mejasem Timur 02 peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Kepala Sekolah SDN Mejasem Timur 02, Bendahara BOS, sebagian guru untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program dana BOS. Kepala sekolah dan Tim manajemen BOS melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Setelah melakukan analisis, pihak guru dan karyawan melakukan rencana anggaran biaya dan program/kegiatan yang akan selama periode satu tahun ajaran. Selanjutnya pengajuan rencana dana kebutuhan nantinya disetujui oleh kepala sekolah dan bendahara BOS.

## 2) Penggunaan Dana BOS

Bedasarkan JUKNIS penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah SDN Mejasem Timur 02 dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada RKAS. Realisasi penggunaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 pada tahun ajaran 2019/2020 sebagai berikut :

- a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran sebesar Rp.16.635.800 yang terdiri dari pembelian buku teks pelajaran SDN Mejasem Timur 02.
- b. Pembiayaan UH, UTS, UAS, UKK, US, UN sebesar Rp.8.547.500, yang terdiri dari pembiayaan penggandaan/ fotokopi soal dan fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sebesar Rp.5.782.500, biaya cetak dan penulisan ijasah sebesar Rp.1.280.000, pembiayaan sarana dan prasarana ujian penjasorkes sebesar Rp.375.000, pembiayaan foto dan cetak sebesar Rp.740.000, pembiayaan sampul ijasah sebesar Rp.370.000.
- c. Pembiayaan penerimaan siswa baru sebesar Rp.1.954.000 dimana terdiri dari kegiatan administrasi sebesar Rp.1.954.000.
- d. Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler sebesar Rp.42.320.500, Yang terdiri dari kegiatan pengadaan alat habis pakai KBM sebesar Rp.3.282.600, pembiayaan pengadaan alat pembelajaran sebesar Rp.750.000 pembayaran kegiatan kepramukaan sebesar Rp.5.760.000 pembayaran kegiatan kesenian sebesar Rp.2.880.000 kegiatan ekstrakurikuler seperti lomba MAPSI, POPDA, kegiatan pramuka, dll sebesar

- Rp.33.680.500, pengadaan administrasi sekolah sebesar Rp.2.175.000, pengadaan bahan praktek SBK sebesar Rp.707.900.
- e. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp.5.320.000, yang terdiri dari pembiayaan pembinaan dan pengembangan pendidikan sebesar Rp.5.320.000.
- f. Pembiayaan langganan daya dan jasa sebesar Rp.6.080.000 terdiri dari pembiayaan listrik sebesar Rp.1.260.000 pembayaran langganan isi ulang tabung gas LPJ sebesar Rp.200.000, pembayaran wifi sebesar Rp.4.020.000, dan langgan air galon sebesar Rp.600.000.
- g. Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp.9.265.000, terdiri dari pembiayaan kegiatan pengecatan sebesar Rp.5.590.000, perbaikan sanitasi sebesar Rp.130.000, perbaikan tempat parker sepeda siswa sebesar Rp.3.545.000, perawatan computer seperti install ulang komputer dan printer sebesar Rp.900.000, pembelian mic dan standar mic sebesar Rp.1.900.000.
- h. Pembayaran honorium guru dan penjaga sekolah pada sebesar Rp.35.700.000.

- i. Pembelian alat /bahan habis pakai sekolah sebesar Rp.21.827.900, yang terdiri dari pembelian buku tulis, spidol, kertas, CD, flashdisk, tinta printer, buku inventaris buku rapor, buku induk guru sebesar Rp.4.773.400, pembelian peralatan kebersihan sekolah seperti tempat sampah, sapu dll sebesar Rp.2.982.000, peralatan kesehatan UKS sekolah sebesar Rp.738.000, pembiayaan petugas pendataan siswa pada Dapodik sebesar Rp.547.000, pembiayaan kegiatan sosialisasi orang tua siswa sebesar Rp.967.500, pembiayaan fotocopy surat menyurat sebesar Rp.726.300, pembelian alat rumah tangga sebesar Rp.220.000, pembelian alat listrik sebesar Rp.407.000, pembelian snack harian pegawai Rp.6.580.000.
- j. Pembelian alat multimedia dan peralatan pembelajaran sebesar Rp.32.966.000 terdiri dari pembelian laptop Lenovo sebesar Rp.9.500.000, pembelian printer sebesar Rp.2.016.000, pembelian kursi siswa sebesar Rp.3.000.000, pembelian meja siswa sebesar Rp.4.500.000, pembelian proyektor sebesar Rp.8.500.000, pembelian tape recorder sebesar Rp.5.450.000.

Penggunaan dana BOS yang telah disebutkan sudah sesuai dengan hasil rapat yang telah disusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). Berdasarkan pemaparan diatas teori mengenai penggunaan dana BOS dapat disimpulkan bahwa SDN Mejasem Timur 02 menggunakan dana BOS sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai aturan penggunaan dana BOS.

### 3) Pengelolaan Dana BOS

Pada proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui Bank penyalur dari Pemerintah Pusat/Daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dilakukan oleh bendahara BOS atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan berlaku. Pencairan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 tidak semua langsung dicairkan pada saat pengambilan, namun disesuaikan kebutuhan yang akan dilaksanakan segera. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02, mengatakan bahwa “proses pengambilan dana BOS dilakukan dibank dan yang bertugas mengambil dana BOS dilakukan oleh bendahara BOS dengan menggunakan cek giro dengan bukti tanda tangan

kepala sekolah dan menunjukan KTP”. Dalam melakukan belanja itu harus dengan persetujuan bendahara dan kepala sekolah dimana bendahara dan kepala sekolah harus tanda tangan disetiap transaksi pembelian yang dilakukan dan setiap pembelian harus disertai bukti yang tertulis seperti faktur atau kwitansi yang telah ditanda tangani oleh toko tersebut.

#### 4) Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan pelaporan dana BOS SDN Mejasem Timur 02, terdiri dari penggunaan dana BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Pertanggungjawaban sekolah pada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Pihak – pihak yang diberikan laporan dana BOS adalah sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS setiap akhir periode”.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS diatas dapat disimpulkan bahwa SDN Mejasem Timur 02 sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS. Hal

ini sebagai bukti bahwa SDN Mejasem Timur 02 sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **4.2.3 Analisis Transparansi Pengelolaan Dana BOS**

Menurut Nico (2007:21-22)<sup>[10]</sup> indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan keputusan anggaran. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02, peneliti melakukan metode wawancara, observasi dan studi dokumen yang berkaitan. Transparansi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Dana BOS sebagai berikut:

##### 1) Transparansi dalam perencanaan dana BOS.

SDN Mejasem Timur 02 membangun kepercayaan stakeholder dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya dan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa pertahun. Hal tersebut sesuai

dengan jawaban dari bendahara BOS SDN Mejasem Timur 02 “dalam membuat RKAS kita membuat dengan mempendomani JUKNIS penegelolaan dana BOS”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam perencanaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik adanya peraturan perundang – undangan dalam menyusun RKAS dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan RKAS.

## 2) Transparansi dalam Pencatatan Dana BOS.

Transparansi dalam perencatatan Dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan dana BOS adanya keterbukaan pencatatan setiap melakukan kegiatan dibuktikan adanya dengan hasil fisik dari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dari penuturan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “jadi dalam pengelolaan anggaran dana BOS itu kita diwajibkan untuk melakukan pencatatan secara terbuka makanya setiap pertemuan kita selalu memperlihatkan buku kas sekolah disitu setiap dana yang terpakai, dana yang masuk dana dana yg diperuntukan untuk apa, dapat

diketahui oleh semua guru, komite dan semua pihak sekolah yang aktif”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pencatatan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai adanya akses stakeholder terhadap pencatatan anggaran dan setiap pencatatan sudah tersedia dibuku kas sekolah disertai dengan bukti – bukti transaksi yang dilakukan.

### 3) Transparansi dalam Penggunaan Dana BOS.

Transparansi dalam penggunaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 bertujuan agar stakeholder percaya karna adanya akses terhadap penggunaan anggaran, sekolah harus terbuka tentang penggunaan anggaran dan dipublikasikan hasil laporan anggaran. Dalam anggaran dana BOS harus sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal dibuktikan dengan penuturan dari bendahara BOS “kita menggunakan anggaran dana anggaran dana BOS untuk kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAS, untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program sekolah, dan membuat laporan pertanggung jawaban disertai dengan kwitansi

dan bukti fisik dan dalam penggunaan dana BOS guru, karyawan, serta orang tua siswa saling bekerjasama”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa SDN Mejasem Timur 02 telah melakukan transparansi dalam penggunaan BOS. Dibuktikan dengan terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan pada warga sekolah dalam proses pembuatan RKAS untuk menentukan anggaran kegiatan sekolah dan proses belajar mengajar.

#### 4) Transparansi dalam Pengawasan Dana BOS.

Transparansi dalam pengawasan dan BOS SDN Mejasem Timur 02 terdiri dari pengawasan intren dan ekstern. Pengawas intern seperti Dinas Pendidikan Kabupaten dan pengawas sekolah. Pengawas ekstern seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Dibuktikan dengan adanya penuturan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “timnya bertugas untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi penggunaan dana BOS, dan komponen yang utama dimonitor yaitu alokasi dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dllterkait dengan penggunaan BOS.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi pengawasan dana BOS cukup baik

karena adanya lembaga audit yang independen dan efektif yang bertujuan untuk memantau ketetapan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai transparansi perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan dana BOS, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik karena sudah memenuhi indikator pencapaian transparansi. Dalam pembuatan RKAS disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite, dan guru. Pencatatan disertai bukti – bukti yang dicatat di buku kas sekolah setiap terjadi transaksi dan diawasi oleh pihak Dinas Pendidikan terkait.

#### **4.2.4 Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana BOS.**

Prinsip akuntabilitas sangat penting karena laporan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dipercaya. Sumer dana BOS digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai rencana yang ditetapkan. Menurut Adrian (2009:398-399)<sup>1</sup> akuntabilitas adalah pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan, pembuatan

keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai – nilai yang berlaku, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai visi misi organisasi yang berlaku. Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari akuntabilitas pencatatan dan pelaporan dana BOS sebagai berikut:

1) Akuntabilitas dalam Pencatatan Dana BOS.

Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS sudah diterapkan oleh SDN Mejasem Timur 02 dapat dilihat dengan adanya dokumentasi dan informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “sudah tersedia dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS seperti dokumen RKAS dan LRA kegiatan”.

2) Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS.

Menurut buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan. Penuturan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman laporan tersebut diberikan kepada pemerintah dan orang tua siswa yang membutuhkan. Waktu pelaporan dana BOS tiap satu triwulan”.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 yaitu dengan membuat laporan pengelolaan dana BOS untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan seperti orang tua, pemerintah. Monitoring terhadap hasil evaluasi penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan dan untuk dana BOS Provinsi dilaporkan per semester. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan anggaran kegiatan, memberikan informasi tentang kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam judul Analisis Penerapan Prinsip Tansparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 yaitu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 telah menggunakan

petunjuk teknis (JUKNIS). SDN Mejasem Timur 02 menggunakan penyusunan anggaran dana BOS dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*). PPBS dilakukan saat rapat kerja awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan dari masing – masing unit di sekolah. Proses pembuatan RKAS menggunakan system bottom up yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru, karyawan serta komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah.

Penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 diterapkan adanya keterlibatan guru, dan komite sekolah dalam pembuatan anggaran dan kegiatan yang sudah dipublikasikan melalui laporan pertanggung jawaban dana BOS yang tersedia di papan informasi yang ada di ruang guru. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 dengan membuat laporan pengelolaan dana BOS untuk dinilai dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan seperti yayasan, orang tua, pemerintah. Monitoring hasil evaluasi penggunaan di sampaikan setiap triwulan, dan untuk dana BOS provinsi dilakukan per semester.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2016) transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS di SMP N 03 Kota Tangerang Selatan) dan Maries (2017) Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan FULL DAY Mardatillah Singaraja

#### 4.3.1 Analisis Transparansi Dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian terkait transparansi dana BOS SDN Mejasem Timur 02 Kec.Kramat Kab.Tegal maka dapat diperbandingkan kesesuaian penerapannya menurut Petunjuk Teknis (JUKNIS) dalam Permendikbud Tahun 2020 pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Analisis Transparansi Dana BOS

No	Aspek Transparansi	Menurut JUKNIS	Menurut SDN Mejasem TIMUR 02	Keterangan
1	Penggunaan Dana BOS	Penggunaan Dana BOS dilakukan secara terbuka	Sekolah mengadakan rapat bersama tim manajemen BOS	sesuai
2	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS dilakukan	Hasil rapat kesepakatan	sesuai

		dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dan membuat RKAS untuk mengelola dana BOS	antara guru dan komite membuat RKAS untuk mengelola dana BOS	
3	Perencanaan Dana BOS	Kewajiban Sekolah untuk melakukan transparansi perencanaan Dana BOS dengan mengumumkan sumber dana, jumlah dana yang diperoleh sekolah	Dengan keterlambatan pencairan dana BOS yang terjadi di SDN Mejasem Timur 02, pelaporan SPJ BOS menjadi terlambat	Tidak Sesuai

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis transparansi menurut JUKNIS sudah sesuai dengan penerapan Transparansi yang ada di sekolah:

- 1 Aspek transparansi dalam Penggunaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud

tahun 2020. Dibuktikan dengan sekolah mengadakan rapat bersama tim manajemen BOS, guru, dan komite sekolah untuk mencapai kesepakatan penggunaan dana BOS dalam satu tahun ajaran.

- 2 Aspek transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan sekolah membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mengelola penggunaan dana BOS.
- 3 Aspek transparansi dalam perencanaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 tidak sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan keterlambatan pencairan dana BOS yang terjadi di SDN Mejasem Timur 02, pelaporan SPJ BOS menjadi terlambat.

#### 4.3.2 Analisis Akuntabilitas Dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian terkait akuntabilitas dana BOS SDN Mejasem Timur 02 Kec.Kramat Kab.Tegal maka dapat diperbandingkan kesesuaian penerapannya menurut Petunjuk Teknis (JUKNIS) dalam Permendikbud Tahun 2020 pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Analisis Akuntabilitas Dana BOS

No	Aspek Akuntabilitas	Menurut JUKNIS	Menurut SDN Mejasem Timur 02	Keterangan

1	Penggunaan Dana BOS	Penggunaan Dana BOS dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan seperti laporan penggunaan BOS	Sekolah bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan dana BOS	Sesuai
2	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS digunakan sesuai kebutuhan sekolah mengacu pada JUKNIS	Kebutuhan sekolah yang ada di SDN Mejasem Timur 02 terhambat karena adanya keterlambatan pada pencairan dana BOS	Tidak Sesuai
3	Perencanaan Dana BOS	Sekolah penerima Dana BOS berkewajiban melakukan monitoring penggunaan dana	Sekolah bekewajiban melakukan monitoring realisasi penggunaan	Sesuai

		BOS	dana BOS	
--	--	-----	----------	--

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis akuntabilitas menurut JUKNIS di atas sudah sesuai dengan penerapan Akuntabilitas yang ada di sekolah:

- 1 Aspek akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan Sekolah bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan dana BOS
- 2 Aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 tidak sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan kebutuhan sekolah yang ada di SDN Mejasem Timur 02 terhambat karena adanya keterlambatan pada pencairan dana BOS.
- 3 Aspek akuntabilitas dalam perencanaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan sekolah bertanggungjawab melakukan monitoring realisasi penggunaan dana BOS untuk memastikan dana BOS yang diterima sudah sesuai dengan anggaran yang di rencanakan atau digunakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik dan sejalan dengan Ekowati (2016)<sup>[4]</sup> transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP N 03 Kota Tangerang Selatan, indikator yang ada di dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu adanya keterlibatan semua stakeholder yang berkepentingan seperti Dinas Pendidikan, tim manajemen sekolah, guru dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan dalam pengelolaan dana BOS. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan Akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi dalam proses pengelolaan dana BOS.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi SDN Mejasem

Timur 02 mengalami keterlambatan pencairan dana BOS. Sehingga dalam hal ini sekolah merasa kesulitan manakala ada kebutuhan mendadak dan dana BOS belum kunjung dicairkan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi agar dalam pencairan dana BOS tidak mengalami keterlambatan pencairan dana. Dalam penggunaan anggaran dana BOS harus sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran agar terhindar dari kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menurut *UU No. 20 Tahun (2003) Sumber APBN dalam pendanaan Pendidikan.*
- [2] Minarti, Sri (2011) *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: ar-Ruzz Media.
- [3] Erna, Fauzia (2016), *Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah.*
- [4] Santi, Ekowati (2016) *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam pengelolaan Dana BOS SMP N 03 Kota Tangerang Selatan.*
- [5] Tutus, Julantika (2017) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SDN Pringgowirawan 02 Jember.*
- [6] Solikhatun, Ismi (2016) *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK 1 Yogyakarta*, Jurnal, Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia Edisi 5.
- [7] Novie, Kiftiah, Maries (2017) *Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan FULL DAY Mardatillah Singaraja.*
- [8] Victoria, Tomi (2014) *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan.*
- [9] Bastian, Indra (2007) *Akuntansi Pendidikan*: erlangga: Jakarta.
- [10] Adrianto, Nico (2007) *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Bayumedia Publishing.
- [11] Novie (2017) *Tujuan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan.*

- [12] Shafratunnisa, Fierda (2015) *Persepsi Stakholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kepada Stakholders di SD Islam Binakheir*.
- [13] Sutedjo (2009) “*Persepsi Stakholders Terhadapap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah*”.
- [14] Waluyo (2007) *Manajemen Publik*. Mandar Maju: Bandung.
- [15] Permendikbud No. 69 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- [16] Fattah (2014) *Biaya pendidikan biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost)*.
- [17] Peraturan, Pemerintah Nomor 48 2008 pasal 59 mengenai prinsip – prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan.
- [18] Juknis BOS (2017) *Dana Bantuan Bos SD/SMP/SMA/SMK*.
- [19] Fauzan (2014) *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana BOS, Journal, Vol 10 No. 3*.
- [20] Mulyono (2010) *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Azz-Russ Media Ma”mur, Jamal Asmani.(2012).
- [21] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26/2017. *Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [22] Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- [23] Sugiyono (2015) *Metode peneltian Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- [24] Widodo. (2017) *Metodologi penelitian populer& praktis*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.